

# Konsep Pembangunan Kota Inklusif Melalui Penataan Pedestrian di Kawasan Kota Lama Semarang

**Aryani Praba Ningrum\***

Spatial Planning Department in Semarang City Government  
Jalan Pemuda No. 148 Sekayu Kota Semarang

## Jurnal Riptek

Volume 19 No. 1 (1-10)

Tersedia online di:

<http://riptek.semarangkota.go.id>

## Info Artikel:

Diterima: 09 April 2025

Disetujui: 07 Mei 2025

Tersedia online: 30 Juni 2025

## Kata Kunci:

Semarang old town, cultural heritage, inclusive city, pedestrian

## Korespondensi penulis:

\*Email:

[aryanidistarukotasemarang@gmail.com](mailto:aryanidistarukotasemarang@gmail.com)

**Abstract.** Semarang Old Town is a site that has a distinctive cultural image featuring classic-colonial architectural buildings which are an important historical part of the city of Semarang. The developments occurring in the Semarang Old Town area today, which has experienced an increase in its function as a tourist destination, are experiencing several new dynamic challenges and experiencing inequality, especially those related to mobility and accessibility, which are manifested in pedestrian arrangements. To reach several points in a comprehensive manner, the Semarang Old Town area must make itself an image of a walkable area for all groups. The Inclusive Town concept emphasizes the importance of integrating and taking into account community diversity in city planning and development. When this concept is applied to pedestrian planning in cultural heritage areas, the aim is to create a pedestrian environment that is accessible to all levels of society, including people who have special needs, as well as those from various cultural backgrounds. This research focuses on studying factors that must be taken into account, especially aspects of pedestrian planning that are friendly to all groups in cultural heritage areas. This research uses a literature review method related to inclusive cities relating to accessibility and pedestrians, as well as a comparative study of inclusive city planning which is considered successful in terms of pedestrian planning. This research produces several aspects that must be developed in governance to create an inclusive city, including universal accessibility, pedestrian safety, ease of access, sidewalk design, street furniture, and consideration of users with special needs. Through the realization of an inclusive city, it is hoped that the Semarang Old Town area will adapt and transform in providing cultural space for the community

Cara mengutip:

Ningrum, A. P. 2025. Konsep Pembangunan Kota Inklusif Melalui Penataan Pedestrian di Kawasan Kota Lama Semarang. Vol. 19 (1) Halaman 1-10. <http://riptek.semarangkota.go.id>

## Pendahuluan

Kota merupakan wujud entitas dinamis yang secara berkelanjutan mengalami perkembangan dan transformasi. Semarang merupakan salah satu kota bersejarah di Indonesia, memiliki warisan budaya yang kaya dan khas, salah satunya adalah Kawasan Kota Lama Semarang, yang merupakan salah satu bagian kota yang ditetapkan sebagai cagar budaya (Manar, 2023). Kota Lama Semarang, sebagai bagian penting dari sejarah, mewariskan nilai-nilai historis, arsitektural, dan sosial yang perlu dilestarikan. Seiring dengan pertumbuhan urbanisasi dan modernisasi, tantangan pembangunan berkelanjutan di Kota Lama Semarang semakin kompleks. Salah satu aspek utama yang perlu mendapat perhatian adalah penataan ruang terbuka dan pedestrian agar dapat menciptakan kota inklusif yang mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat (Lawson, Eskytè, Orchard, Houtzager, & De Vos, 2022). Kota inklusif adalah konsep pembangunan kota yang mementingkan partisipasi dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi,

budaya, atau kondisi fisik. Dalam konteks kota inklusif, tujuannya adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang ramah, dapat diakses, dan memberikan manfaat secara merata kepada semua masyarakat, baik kelompok warga yang bermukim maupun wisatawan yang berkunjung.

Perkembangan kawasan cagar budaya Kota Lama Semarang saat ini telah mengalami berbagai tantangan sebagai bagian dari tujuan wisata, diantaranya adalah tantangan aksesibilitas, tantangan munculnya bangunan dan infrastruktur modern, serta meningkatnya intensitas wisata (Kartikasari & Wibisono, 2022). Area - area mungkin tidak mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Jalur pejalan kaki yang tidak ramah disabilitas atau akses kendaraan yang sulit dapat menjadi hambatan. Munculnya kebutuhan pembangunan infrastruktur modern, seperti jalan raya atau bangunan baru, yang mungkin bertentangan dengan prinsip pelestarian dan

keaslian kawasan Cagar Budaya. Lonjakan jumlah wisatawan dapat menyebabkan masalah seperti kepadatan lalu lintas, tingginya tingkat kebisingan, dan manajemen sampah yang tidak memadai, yang semuanya dapat merugikan lingkungan dan pengalaman pengunjung (Utami & Widyasputri, 2023). Melihat situasi tersebut diperlukan sebuah konsep perencanaan kota yang mampu dijadikan sebagai solusi yang tepat untuk mencakup pendekatan holistik yang mempertimbangkan kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk didalamnya terdapat aspek pelestarian budaya, yakni konsep perencanaan Kota Inklusif.

Menurut R. Naik Singru dan M. Lindfield (2016), kota inklusif adalah salah satu agenda yang mewakili fokus untuk melibatkan dan melibatkan kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang membentuk kota tempat mereka tinggal (Naik, 2016). Secara sederhana kota inklusif dapat didefinisikan sebagai kota yang ramah bagi semua warga yang tinggal di kota tersebut, artinya seluruh fasilitas yang ada di kota tersebut mampu dijangkau oleh warganya termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

Dalam pembangunan kota inklusif, terdapat sekelompok masyarakat yang harus diberikan perhatian khusus agar tercipta pemerataan kesempatan untuk mengakses hasil pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur. Kelompok masyarakat tersebut adalah penyandang disabilitas dimana mereka harus terjamin kesempatannya untuk mengakses hasil pembangunan tanpa hambatan dan secara mandiri. Di Indonesia, peraturan pembangunan lingkungan yang aksesibel dan inklusif mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Didalam pasal 3 dijelaskan tujuan dari pedoman teknis tersebut adalah untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.

Ketersediaan jalur pedestrian harus dapat menjadi fasilitas inklusif yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh kalangan pejalan kaki dalam mendukung aktivitasnya. Beragamnya pejalan kaki dalam hal usia, jenis kelamin, dan kondisi fisik memerlukan perancangan jalur pedestrian yang mampumelayani pengguna dengan jangkauan yang luas (Asadi-Shekari, Moeinaddini, & Zaly Shah, 2013). Ketika sebuah kota tidak dapat diakses oleh

penyandang disabilitas, maka hal tersebut melanggar hak asasi mereka dan membatasi akses terhadap peluang seperti pekerjaan dan Pendidikan (Pinilla-Roncancio & Alkire, 2021). Lingkungan yang inklusif merupakan langkah awal pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk membantu mencapainya ini adalah dengan memperkenalkan standar desain universal. Menurut laporan Departemen Pembangunan Internasional Inggris, desain inklusif pembangunan lingkungan binaan melalui desain universal merupakan salah satu dari enam bidang prioritas pembangunan infrastruktur yang inklusif bagi penyandang disabilitas (Kett, Cole, & Turner, 2020).

Salah satunya mengenai pembangunan yang berorientasi pada manusia dengan prinsip inklusif *no one left behind*, dengan harapan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Atchoarena & Howells, 2021). Demi mengupayakan sebuah kota inklusif harus memiliki target untuk memberikan perhatian khusus dan mendukung mobilitas pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan melalui penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana kota dan sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan serta memberdayakan mereka menjadi individu mandiri yang juga berkiprah di masyarakat.

Artikel ini berfokus pada kajian pembangunan kota inklusif di Kota Lama Semarang melalui penataan pedestrian. Adanya tekanan urbanisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat memerlukan pendekatan yang berkesinambungan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pedestrian. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang tertanam dalam kawasan cagar budaya. Tujuan pembahasan artikel ini adalah untuk mendalami konsep dan implementasi pembangunan kota inklusif melalui penataan pedestrian di Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Semarang. Dengan memahami karakteristik dan tantangan khusus kawasan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas ruang publik, mempromosikan mobilitas berkelanjutan, dan melestarikan warisan budaya. Buah pikir dalam artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perencanaan dan pengembangan kota, terutama dalam konteks Kota Lama Semarang. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, lembaga terkait, dan

masyarakat untuk melibatkan diri dalam upaya pembangunan kota yang inklusif, berkelanjutan, dan mempertahankan identitas budaya.

### Kajian Pustaka

Kehadiran konsep Kota Inklusif dilatarbelakangi dari sebuah masalah sosial yang menitikberatkan pada keberadaan masyarakat yang difabel, untuk dapat mengakses seluruh bagian kota tanpa batasan. Inklusif lahir dari sebuah batasan akar permasalahan dari 'social exclusion' yang berasal dari beberapa faktor, diantaranya keterbatasan fisik, kultural dan sosial. Kota yang inklusif menempatkan segala lapisan masyarakat dan menghargai secara setara. Terdapat 3 (tiga) faktor yang perlu diperhatikan untuk menciptakan sebuah kawasan kota inklusif, yakni (1). *Spatial inclusion*, atau disebut juga inklusi ruang fisik, yang meliputi hunian yang layak, dilengkapi dengan sumber air dan sanitasi yang baik; (2). *Social inclusion* atau inklusi sosial, yakni dimana sebuah kota inklusif dapat memberi jaminan kesetaraan hak partisipasi untuk semua, termasuk kaum marjinal; (3). *Economic inclusion* atau inklusi ekonomi, yakni penciptaan akses ke lapangan kerja sehingga berperan dalam tumbuhnya ekonomi (Elias, 2020). Inklusifitas menurut Pierson, disebut diakibatkan dari sebuah kondisi social exclusion, yakni yang terdiri dari 5 (lima) komponen penting, diantaranya (1) kemiskinan, (2) pengangguran, (3) tidak adanya jejaring pendukung sosial, (4) pengaruh tempat tinggal dan lingkungan sosial, (5) terpisah dari layanan umum. Dari berbagai lapisan masyarakat, kaum difabel merupakan kelompok yang paling rentan terhadap inklusi sosial yang beresiko paling tinggi (Pierson, 2009).

Jane Jacobs memaparkan konsep "eyes on the street" yang menekankan pentingnya aktivitas manusia di jalanan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan kota (Jacobs, 2007). Konsep ini mendukung inklusivitas dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik. Jan Gehl menyoroti perlunya merancang kota dengan fokus pada manusia. Dalam teorinya, Gehl menekankan desain ruang publik yang ramah pejalan kaki, menyediakan tempat duduk, dan mengakomodasi berbagai kebutuhan manusia untuk menciptakan kota inklusif (Gehl, 2013). Richard Florida memaparkan konsep "creative class" yang menyoroti pentingnya keragaman budaya dan inklusi sosial dalam membangun kota yang inovatif dan berkembang. Pemikiran ini menekankan peran kelompok-kelompok beragam dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi dan sosial (Florida, 2003). Janice Perlman

menggambarkan kehidupan di favela dan menyoroti bagaimana masyarakat yang kurang beruntung dapat menjadi bagian penting dari perkembangan kota. Pendekatannya mendorong inklusi sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Perlman, 2006). Paula Allen-Meares dkk., menguraikan bagaimana pekerjaan sosial dapat berkontribusi pada pembangunan kota inklusif. Konsep ini menekankan peran pekerja sosial dalam membantu kelompok rentan agar dapat ikut serta dalam kehidupan kota (Allen-Meares, Hudgins, Engberg, & Lessnau, 2005).

WHO menyajikan panduan untuk membuat kota yang ramah bagi semua usia. Ini mencakup desain yang mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan kegiatan sosial untuk memastikan kota inklusif untuk semua generasi. Konsep New Urban Agenda dari PBB menekankan pentingnya pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini menyoroti aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat, aksesibilitas, dan pengurangan disparitas sosial (Giles-Corti, Lowe, & Arundel, 2020). Perwujudan mengenai pemenuhan mobilitas dan kebutuhan bagi kelompok disabilitas melalui prinsip desain pedestrian dan ruang terbuka dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- Inklusivitas: jalur pejalan kaki harus dapat diakses berbagai tipe pengguna.
- Aksesibilitas: didukung oleh titik transit yang saling terkoneksi dengan titik transit lainnya dalam satu kesatuan sistem konektivitas kota & regional (makro), mewujudkan jaringan yang mampu melayani kawasan, mewujudkan kawasan yang berbasis transportasi publik melalui penyediaan sistem dan sarana prasarana interchange modafasilitas pejalan kaki harus dapat diakses oleh berbagai tipe pengguna
- *Walkable: continuous pedestrian ways* yang menghubungkan seluruh aktivitas yang mix dan compact sehingga menghasilkan ruang yang vibrant, aktif, dan hidup, menciptakan kawasan yang ramah dan nyaman bebas dari hambatan bagi pejalan kaki dengan menyediakan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transportasi publik.

Beberapa penelitian telah membahas dimensi yang berbeda dari topik ini, memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan pengembangan Kota Lama Semarang. Nooringsih & Susanti (2022) berfokus pada implementasi konsep kota pintar di Kawasan Kota Lama Semarang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip kota

pintar di kawasan cagar budaya ini. Perspektif ini sangat penting karena sejalan dengan kebutuhan akan solusi inovatif dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kelayakan huni dan keberlanjutan Kota Lama (Nooringsih & Susanti, 2022). Adhianti dkk. (2020) menekankan pentingnya mengintegrasikan berbagai moda transportasi dan menerapkan pembangunan berorientasi angkutan umum di kawasan Kota Lama Semarang, termasuk penambahan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Pendekatan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki dan mendorong mobilitas yang berkelanjutan di dalam kawasan cagar budaya (Adhianti, Ronauli, & Kezia, 2020).

Meytasari & Tisnawati (2018) menyoroiti pentingnya mengembangkan produk pariwisata dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, untuk mempromosikan Kota Lama Semarang sebagai tujuan wisata pusaka perkotaan yang menarik. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendekatan kolaboratif dan inklusif dalam pengembangan kota yang mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan (Meytasari & Tisnawati, 2018). Dameria dkk. (2022) mengeksplorasi hubungan antara rasa memiliki tempat dan perilaku pusaka yang berkelanjutan di Kota Lama Semarang, yang menjelaskan pentingnya melestarikan identitas budaya dan signifikansi historis daerah tersebut. Aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan menghormati dan meningkatkan nilai pusaka yang unik di Kota Lama (Dameria, Akbar, Indradjati, & Tjokropandojo, 2022). Sodiq dkk. (2019) menekankan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam konservasi sejarah, yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem informasi warisan budaya untuk Kota Lama Semarang. Aspek teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang warisan budaya di Kota Lama (Sodiq, Saraswati, & Prabowo, 2019). Beragam perspektif ini menggarisbawahi sifat interdisipliner dari topik ini dan perlunya pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mencapai pengembangan kota inklusif di warisan budaya Kota Lama Semarang.

### Metoda Analisa

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dalam proses pengumpulan dan analisis data (Abdussamad & Sik, 2021). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang

fenomena yang sedang diteliti, dalam hal ini, penataan kota inklusif di kawasan Kota Lama Semarang. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dan konteks yang terlibat dalam penataan kota, serta memberikan ruang bagi penemuan temuan baru yang mungkin tidak tercakup dalam kerangka penelitian yang lebih kaku.

Proses pengumpulan data melibatkan beberapa teknik, termasuk observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik dan sosial kawasan Kota Lama Semarang secara langsung, sedangkan wawancara digunakan untuk mendapatkan sudut pandang dan pengalaman langsung dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan penataan kota inklusif. Analisis dokumen juga dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti peraturan daerah, rencana tata ruang, dan dokumentasi proyek terkait. Studi komparatif juga dilakukan dengan memilih kota-kota lain yang memiliki relevansi untuk perbandingan. Pemilihan kota-kota ini didasarkan pada kriteria seperti karakteristik serupa atau keberhasilan dalam menerapkan penataan kota inklusif. Ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan kota inklusif.

Variabel atau aspek yang digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi tingkat inklusivitas penataan kota telah ditetapkan melalui kajian literatur dan penelitian terdahulu. Beberapa variabel tersebut mencakup aksesibilitas fisik, ketersediaan fasilitas umum, ketersediaan informasi, dan dukungan terhadap difabel. Analisis dilakukan secara holistik terhadap variabel-variabel ini untuk mengevaluasi tingkat inklusivitas kota. Pendekatan induktif digunakan dalam analisis data, di mana peneliti mengumpulkan data tanpa memiliki hipotesis sebelumnya. Analisis dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang terkumpul, memungkinkan munculnya temuan atau pola baru yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dengan fokus utama pada memberikan deskripsi yang mendalam tentang konteks, pengalaman, dan fenomena yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan pengembangan praktik penataan kota inklusif di kawasan Kota Lama Semarang dan kota-kota lainnya.

Variabel atau aspek tolok ukur untuk penataan kota inklusif dapat mencakup berbagai dimensi

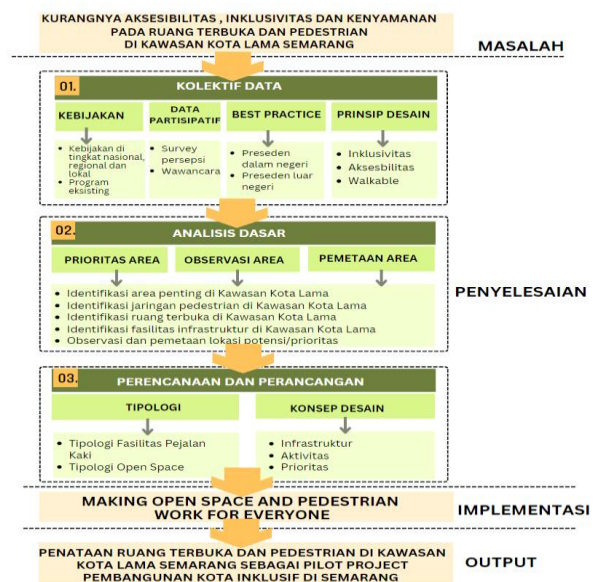
yang mencerminkan keberagaman kebutuhan dan pengalaman warga. Berikut adalah beberapa variabel yang dapat dijadikan aspek tolok ukur untuk mengevaluasi tingkat inklusivitas penataan kota, diantaranya: (1) aksesibilitas fisik, meliputi lebar dan kondisi trotoar, aksesibilitas bagi pejalan kaki dengan disabilitas, Keberadaan fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang aman dan ramah difabel; (2) ketersediaan fasilitas umum, meliputi ketersediaan bangku dan tempat istirahat, pencahayaan jalan yang memadai; (3) ketersediaan informasi, akses mudah ke informasi publik, misalnya, melalui papan informasi atau teknologi digital, serta (4) dukungan terhadap difabel. Analisis tingkat inklusivitas kota melalui variabel-variabel ini membantu merinci dan mengevaluasi sejauh mana kota tersebut dapat diakses, dinikmati, dan memberdayakan seluruh komunitasnya. Penilaian holistik terhadap variabel ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang inklusivitas kota.

Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, di mana peneliti mengumpulkan data tanpa mengajukan hipotesis sebelumnya (Yulianah, 2022). Analisis dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang terkumpul, memungkinkan munculnya temuan atau pola baru. Fokus utama penelitian deskriptif kualitatif adalah memberikan deskripsi yang mendalam tentang konteks, pengalaman, atau fenomena yang sedang diteliti. Ini mencakup pemahaman yang luas terkait dengan makna, nilai, dan konteks sosial dari sebuah data yang diperoleh.

**Hasil dan Pembahasan**

Kawasan Kota Lama merupakan kawasan yang memiliki sejarah penting bagi Kota Semarang (Hayati & Drihartati, 2021). Basis kawasan tersebut adalah kawasan cagar budaya dengan konsep pelestarian melalui pariwisata perkotaan dengan atraksi utama berupa bangunan-bangunan cagar budaya dengan arsitektur khas bergaya kolonial sehingga dikenal dengan sebutan *Little Netherland*. Dukungan Kawasan Kota Lama Semarang sebagai destinasi wisata perkotaan (*urban tourism*) juga dapat dilihat dari ketersediaan komponen utama pariwisata seperti atraksi wisata, aksesibilitas dan amenities yang menunjang kegiatan kepariwisataan (Handaruni, 2021). Berbagai upaya pemerintah dalam melestarikan dan melindungi kawasan Cagar Budaya Kota Lama Semarang telah dilakukan selama ± 25 tahun, baik melalui kebijakan dan perbaikan kondisi kawasan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut.

Namun setelah upaya revitalisasi, kawasan Kota Lama Semarang masih dihadapkan beberapa permasalahan seperti adanya ruang-ruang yang belum dimanfaatkan secara optimal dan kerawanan terhadap bencana banjir (Muzakki, Rizky, & Nafisah, 2022; Sasongko, 2023). Dari aspek kelembagaan pun turut menjadi perhatian sebab ruang gerak lembaga pengelola yang masih terbatas dan partisipasi masyarakat yang belum terkoordinasi secara baik dalam hal keikutsertannya mengelola kawasan. Selain itu, perlunya perhatian khusus pada aksesibilitas pejalan kaki dan titik-titik transit lainnya karena dirasa dirasa masih kurang mengakomodir kebutuhan dari kelompok disabilitas (Rahardjo, Purwanto, & Widjaja, 2023). Hal ini dimungkinkan karena belum adanya kesadaran akan kebutuhan dan standar disabilitas menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang baik pada saat perancangan dan penerapan konstruksi fitur-fitur tersebut.



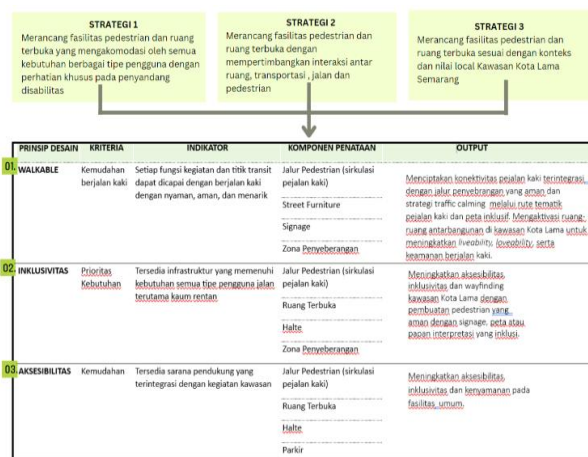
Sumber: Analisa Penulis, 2025

**Gambar 1. Diagram Penyelesaian Permasalahan di Kawasan Kota Lama Semarang.**

Perbaikan fasilitas menuju kemudahan aksesibilitas yang perlu dilakukan dirancang dan dilaksanakan sebagai pendekatan terpadu dan holistik yang mencakup semua pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat (Wahyuni, 2021). Pada Kawasan Kota Lama Semarang berapa titik area sudah dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti blok pemandu, jalur landai, dan papan petunjuk untuk membantu penyandang disabilitas menavigasi ruangan. Namun kualitas dari fasilitas-fasilitas tersebut masih jauh dari memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga belum dapat terakses dengan baik. Begitu pula pada pada fasilitas transportasi BRT Semarang

dirasa belum memenuhi standart aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Di lain hal, keamanan dan kenyamanan dalam penyeberangan jalan juga belum diperhatikan. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya pengarusutamaan standar dan konsep desain aksesibilitas universal pada seluruh proses pembangunan dan pada seluruh aktor pembangunan (Hamsal & Abdinagoro, 2021). Untuk itu, perlu disusun sebuah alat ukur komprehensif untuk mengukur inklusi disabilitas pada penataan Kawasan Kota Lama Semarang sebagai indikator pemenuhan hak disabilitas.

Kota yang inklusif adalah tempat di mana setiap orang dapat mengakses segalanya dan merasa berdaya untuk melakukannya (Safei, 2020). Praktik kota inklusif memastikan bahwa kota dibangun secara adil dan dapat menyediakan layanan publik yang dapat diakses semua pihak. Namun masih banyak permasalahan untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Penelitian ini membahas permasalahan di Kawasan Kota Lama Semarang yang dikaitkan dengan prinsip inklusif kota.



Sumber: Analisa Penulis, 2025

**Gambar 2. Diagram Implementasi Penataan Ruang Terbuka dan Pedestrian di Kawasan Kota lama Semarang Sebagai Konsep Pembangunan Kota Inklusif di Semarang.**

Untuk implementasi penataan ruang terbuka dan pedestrian di Kawasan Kota Lama Semarang sebagai konsep pembangunan kota inklusif di Semarang mengacu pada strategi dari penyelesaian permasalahan di Kawasan Kota Lama Semarang. Unsur aksesibilitas, inklusivitas dan kenyamanan pada pedestrian dijabarkan ke dalam prinsip desain walkable, inklusivitas dan aksesibilitas untuk menghasilkan output dari hasil perencanaan.

Selanjutnya melalui tabel berikut dijabarkan terkait bagaimana penerapan inklusivitas tersebut diterapkan ke dalam rancangan pedestrian pada

kawasan cagar budaya Kota Lama, bersama dengan pembandingan terhadap studi kasus di kawasan yang lain.

No	Prinsip Penataan Kota Inklusif	Kondisi Ideal (Best Practices)		Kondisi di Kota Lama Semarang	Konsep Rekomendasi
1	Walkable	Kawasan Malioboro Yogyakarta	Terdapat ruang vibrant di kedua sisi koridor barat dan timur	Titik-titik kumpul yang vibrant baru dapat dirasakan di ruas jalan utama yang dilalui kendaraan, sedangkan bagian koridor belakang belum optimal.	Diciptakan ruang-ruang aktif bagi pejalan kaki sehingga lebih memudahkan kesinambungan antar segmen ruang atau zona.
		Kawasan Kota Tua, Jakarta	Kesinambungan yang baik antara trotoar satu dengan yang lain.		
2	Inklusivitas	Kawasan Malioboro Yogyakarta	Terdapat ruang-ruang hidup pada setiap pemberhentian, dilengkapi dengan seating group yang memadai, dilengkapi juga fasilitas tekstur perkerasan sebagai penanda untuk disabilitas dan tuna netra.	Ditinjau dari keberadaan guiding block, persebarannya belum merata.  Bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda belum optimal aksesibel untuk semua koridor jalan.  Belum memadai fasilitas untuk kegiatan berolahraga pagi.	Evaluasi penempatan wayfinding yang baik ditempatkan pada titik-titik ruas jalan yang strategis.  Penyediaan peta atau papan informasi yang penempatan tingginya sesuai dengan kondisi disabilitas.
		Kawasan Kota Tua, Jakarta	Penyediaan infrastruktur yang cukup baik bagi disabilitas. Penyediaan fasilitas bike track dan jogging track sebagai fasilitas olahraga.		
3	Aksesibilitas	Kawasan Malioboro Yogyakarta	Sisi barat Malioboro sementara ini belum memiliki guiding block seperti pada sisi timur. Namun penataan di sisi timur sudah cukup baik.	Kerawanan terhadap banjir lokal.  Keamanan dan kenyamanan pada saat menyeberang jalan kurang memadai.	Pertimbangan penyediaan ramp untuk beberapa bagian ruas jalan yang mengarah ke transportasi publik dan penyeberangan.  Pembatasan kecepatan terhadap pengendara yang memasuki koridor jalan utama.
		Kawasan Kota Tua, Jakarta	Memiliki faktor keamanan menyeberang yang cukup tinggi.		

Sumber: Analisa Penulis, 2025

**Tabel 1. Studi Komparasi dengan Kawasan Cagar Budaya di Kota Lain**

Penyebab yang menjadikan Kawasan Kota Lama Semarang kurang aksesibilitas, kurang inklusivitas dan kurang nyaman pada ruang terbuka dan pedestrian adalah sebagai berikut. Kurangnya kesadaran bersama akan pentingnya Aksesibilitas dan Inklusivitas. Kurangnya pemahaman mengenai mobilitas bagi kelompok rentan dari para pemangku kepentingan, masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Karena masyarakat mayoritas belum memahami dan memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas lingkungan inklusif dalam berbagai bidang. Belum optimalnya upaya pemerintah dalam Pembangunan infrastruktur yang inklusif. Belum adanya

pengarusutamakan standar dan konsep desain universal di seluruh proses pembangunan dan pada seluruh aktor pembangunan. Dimana masing-masing tipe Masyarakat memiliki kebutuhan berbeda tentang ruang publik berdasarkan pengalaman mereka. Perbedaan tersebut membuat kebingungan terkait aspirasi mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Penyandang Disabilitas Mengenai Infrastruktur yang Inklusif. Berdasarkan kebijakan yang ada, disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Pada bagian pengembangan eksisting kawasan Kota Lama Semarang, perlu dipertimbangkan dari aspek historis yang ditinjau. Struktur jalan (pola) di Situs Kota Lama tetap dipertahankan / tidak berubah dari abad ke 17 hingga sekarang (artinya tidak ada penambahan jalan maupun pengurangan), karena hal ini mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi, seperti Jl. Letjen Suprpto adalah merupakan jalur jalan Deandelles (Jakarta-Panarukan). Material yang digunakan adalah dengan menggunakan paving yang lebih nyaman dan dapat menyerap air. Untuk hirarki jalan di Situs Kota Lama merupakan jalan lokal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Ayuning & Mardiansjah, 2022). Strategi dari penyelesaian permasalahan kurangnya aksesibilitas, inklusivitas dan kenyamanan pada ruang terbuka dan pedestrian di Kawasan Kota Lama Semarang adalah Merancang fasilitas pedestrian dan ruang terbuka yang mengakomodasi oleh semua kebutuhan berbagai tipe pengguna dengan perhatian khusus pada penyandang disabilitas. Merancang fasilitas pedestrian dan ruang terbuka dengan mempertimbangkan interaksi antar ruang, transportasi, jalan dan pedestrian. Merancang fasilitas pedestrian dan ruang terbuka sesuai dengan konteks dan nilai lokal Kawasan Kota Lama Semarang.

## Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap kawasan pedestrian di Kota Lama Semarang dengan pendekatan walkability, inklusivitas, dan aksesibilitas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbaikan signifikan, kawasan ini belum sepenuhnya ramah bagi semua lapisan pengguna, terutama kelompok disabilitas dan rentan. Aksesibilitas memang cukup baik di jalur utama dengan lebar pedestrian yang memadai dan fasilitas seperti bangku serta pencahayaan yang baik, namun belum merata ke seluruh zona kawasan, terutama pada percabangan zonasi

sekunder yang sulit diakses. Tidak tersedianya jalur khusus difabel, fasilitas air minum, toilet ramah difabel, serta tempat sampah dan ramp yang tersebar secara strategis menunjukkan bahwa aspek inklusivitas belum menjadi prioritas utama. Selain itu, kepadatan kendaraan pada jalur utama menciptakan gangguan kebisingan yang menurunkan kenyamanan pengguna. Aktivitas informal yang tidak tertata juga menjadi hambatan fisik dalam pergerakan pejalan kaki. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi perencanaan lintas sektor, khususnya dalam penyediaan fasilitas universal yang mempertimbangkan kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan akses bagi semua. Penempatan pos pengamanan di titik strategis serta pelibatan aktif kelompok termarginalkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan menjadi aspek penting dalam menciptakan ruang publik yang inklusif. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada belum meratanya cakupan evaluasi terhadap seluruh ruas dan waktu observasi yang terbatas, sehingga diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan partisipatif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan dan tepat sasaran serta metode yang digunakan, yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua perspektif pemangku kepentingan. Sehingga perlunya analisis yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial-ekonomi dari penataan ruang terbuka dan pedestrian perlu dilakukan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang inklusi sosial.

## Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*: CV. Syakir Media Press.
- Adhianti, R. A. C., Ronauli, R., & Kezia, L. (2020). Integrasi Antarmoda dengan penerapan transit-oriented development pada kawasan Kota Lama Semarang. *Warta Penelitian Perhubungan*, 32(2), 113-124.
- Allen-Meares, P., Hudgins, C. A., Engberg, M. E., & Lessnau, B. (2005). Using a collaboratory model to translate social work research into practice and policy. *Research on Social Work Practice*, 15(1), 29-40.
- Asadi-Shekari, Z., Moeinaddini, M., & Zaly Shah, M. (2013). Disabled pedestrian level of service method for evaluating and promoting inclusive walking facilities on urban streets. *Journal of Transportation Engineering*, 139(2), 181-192.

- Atchoarena, D., & Howells, A. (2021). Advancing learning cities: Lifelong learning and the creation of a learning society. In *Powering a learning society during an age of disruption* (pp. 165-180): Springer Nature Singapore Singapore.
- Ayuning, O., & Mardiansjah, F. H. (2022). Pemangku kepentingan dalam pengembangan Kota Lama Semarang berdasarkan peran dan tingkat kepentingan. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 500-523.
- Dameria, C., Akbar, R., Indradjati, P. N., & Tjokropandojo, D. S. (2022). The relationship between residents' sense of place and sustainable heritage behaviour in Semarang Old Town, Indonesia. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 10(1), 24-42.
- Elias, P. (2020). Inclusive City, Perspectives, Challenges, and Pathways. In *Sustainable Cities and Communities* (pp. 290-300): Springer.
- Florida, R. (2003). Cities and the creative class. *City & community*, 2(1), 3-19.
- Gehl, J. (2013). *Cities for people*: Island press.
- Giles-Corti, B., Lowe, M., & Arundel, J. (2020). Achieving the SDGs: Evaluating indicators to be used to benchmark and monitor progress towards creating healthy and sustainable cities. *Health Policy*, 124(6), 581-590.
- Hamsal, M., & Abdinagoro, S. B. (2021). *Sustainable Tourism Pariwisata Wisata di Era Normal Baru*: Scopindo Media Pustaka.
- Handaruni, R. (2021). *Perubahan Spasial pada Koridor Kawasan Cagar Budaya Jl. Letjend Soeprapto Kota Lama Semarang*. UNS (Sebelas Maret University),
- Hayati, E. D., & Drihartati, S. S. (2021). Penerapan Teknik Kepemanduan Wisata Dalam Narasi Pemandu Wisata Kota Lama Semarang. *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial dan Humaniora*, 7(1, April), 70-82.
- Jacobs, J. (2007). The uses of sidewalks: safety. In *Urban Design Reader* (pp. 147-152): Routledge.
- Kartikasari, A. N., & Wibisono, B. H. (2022). Interconnections and continuity among planning documents of Kota Lama Semarang development within the context of urban heritage conservation. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*.
- Kett, M., Cole, E., & Turner, J. (2020). Disability, mobility and transport in low-and middle-income countries: a thematic review. *Sustainability*, 12(2), 589.
- Lawson, A., Eskyté, I., Orchard, M., Houtzager, D., & De Vos, E. L. (2022). Pedestrians with Disabilities and Town and City Streets: From Shared to Inclusive Space? *The Journal of Public Space*, 7(2), 41-62.
- Manar, D. G. (2023). Kebijakan Revitalisasi Cagar Budaya Kota Lama Semarang dalam Prespektif Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 369-375.
- Meytasari, C., & Tisnawati, E. (2018). The Tourism Element Product Development of Semarang Old City Based on Attractive Urban Heritage Approach. *ARSITEKTURA*, 16(1), 107-118.
- Muzakki, A., Rizky, A. C., & Nafisah, A. S. (2022). *ANALISIS BANJIR ROB DAN PENANGGULANGANNYA DI KOTA SEMARANG*. Paper presented at the Indonesian Conference of Maritime.
- Naik, R. (2016). *Enabling Inclusive Cities: Tool Kit for Inclusive Urban Development*.
- Nooringsih, K., & Susanti, R. (2022). *Implementation of Smart City Concept for Sustainable Development in Semarang Old Town Area*. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Perlman, J. E. (2006). Megacities and the urban century: shrinking world, growing cities. In *City Edge* (pp. 168-177): Routledge.

- Pierson, J. H. (2009). *Tackling social exclusion: Promoting social justice in social work*: Routledge.
- Pinilla-Roncancio, M., & Alkire, S. (2021). How poor are people with disabilities? Evidence based on the global multidimensional poverty index. *Journal of Disability Policy Studies*, 31(4), 206-216.
- Rahardjo, F. E. K., Purwanto, L., & Widjaja, R. R. (2023). PENYEDIAAN FASILITAS PEJALAN KAKI BAGI DISABILITAS PADA TAMAN KOTA AKTIF DI SEMARANG. *Tesa Arsitektur*, 21(1), 15-26.
- Safei, A. A. (2020). *Sosiologi Toleransi Kontestasi, Akomodasi, Harmoni* (Vol. 1): Deepublish.
- Sasongko, I. (2023). Penataan Ruang Pengantar Pemahaman Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan. In: PT. Muara Karya (Anggota IKAPI).
- Sodiq, I., Saraswati, U., & Prabowo, A. (2019). The ICT and Historical Conservation in Semarang. *KnE Social Sciences*, 247–255-247–255.
- Utami, C. R., & Widyasputri, V. T. A. (2023). Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam Meningkatkan Kualitas Daya Tarik Objek Wisata Kota Semarang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4994-5007.
- Wahyuni, E. S. (2021). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik*: Penerbit NEM.
- Yulianah, S. (2022). *Metodelogi Penelitian Sosial*: CV Rey Media Grafika.

